

Program MBKM: Sebuah Dilema Bagi Perguruan Tinggi?

Syahril¹, Karunia Puji Hastuti^{2*}, Deasy Arisanty²

¹ S3 Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Bogor

² Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Lambung Mangkurat

*karuniapuji@ulm.ac.id

Abstract

The Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) program policy issued by the Minister of Education and Culture has been introduced and implemented in 2020 in all public/private universities in Indonesia. Since its inception, the program has been a real challenge for all colleges to carry it out on their respective campuses. Various responses from the academic community have been given to improve the MBKM program. This research approach uses the library research method. In literature, data is obtained through scrutiny of related literature in the form of articles, books, documents, and scrutiny of online literature. Furthermore, the data is analyzed and described according to the theme discussed. The results of the implementation of the MBKM program show that there are several advantages that have a positive impact on the academic community, especially students. But in addition, the MBKM program also has several disadvantages. Therefore, several solutions are needed to overcome these weaknesses. One of them is through careful planning, socialization and evaluation together from various related elements. So that the objectives of the MBKM program can be achieved properly

Keywords: MBKM, academic community, universities

Abstrak

Kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah diperkenalkan dan diimplementasikan pada tahun 2020 di seluruh perguruan tinggi negeri/swasta di Indonesia. Sejak awal peluncurannya, program ini menjadi tantangan yang nyata bagi seluruh perguruan tinggi untuk melaksanakannya di kampus masing-masing. Berbagai respon dari civitas akademika telah diberikan menyempurnakan program MBKM. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode library research. Dalam satu kepustakaan, data diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur online. Selanjutnya data dianalisis dan diuraikan bahasan yang sesuai tema yang dibahas. Hasil pelaksanaan program MBKM menunjukkan terdapat beberapa keunggulan yang membawapengaruh positif terhadap civitas akademika khususnya mahasiswa. Tetapi di samping itu program MBKM juga memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itulah diperlukan beberapa solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Salah satunya melalui perencanaan,

sosialisasi dan evaluasi yang matang secara bersama dari berbagai unsur terkait. Sehingga tujuan dari program MBKM dapat tercapai dengan baik.

Kata kunci: MBKM, civitas akademika, perguruan tinggi

DOI: [10.20527/jpg.v10i1.15666](https://doi.org/10.20527/jpg.v10i1.15666)

Received: 21 Februari 2023; **Accepted:** 13 Maret 2023; **Published:** 20 Maret 2023

How to cite: Syahril, Arisanty, D., Hastuti, K. P. (2023). Program Mbkm: Sebuah Dilema Bagi Perguruan Tinggi?. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, Vol. 10 No. 1. <http://dx.doi.org/10.20527/jpg.v10i1.15666>

© 2023 JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)

*Corresponding Author

1. Pendahuluan

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih sepadan dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan (Arifin & Muslim, 2020).

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Dikti, 2020a). Implementasi kurikulum MBKM harus dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dan program studi (Arifin & Muslim, 2020; Nofia, 2020). Tantangan ini harus dihadapi dengan mempersiapkan pengembangan kurikulum program studi dengan mengadaptasi kebijakan MBKM meliputi aspek perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran (Dikti, 2020b). Selain itu, dalam mengembangkan kurikulum di program studi harus memperhatikan profil lulusan dan Capaian Pembelajaran (CPL) yang sesuai konten belajar dengan tantangan di masa yang akan datang (Dimmera et al., 2022). Kurikulum MBKM harus memberikan pengalaman belajar bermakna bagi mahasiswa selaku peserta didik dengan memberikan kebebasan dalam belajar akademik dan non akademik serta secara komprehensif perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di universitas mulai dari para pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna (Putra et al., 2022; Sherly et al., 2021).



Gambar 1. Program MBKM (Dikti, 2020b)

Salah satu program utama yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi (Baharuddin, 2021; Junaidi, 2020). Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen (Putra et al., 2022; Sopiansyah & Masruroh, 2022). Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Namun implementasi Kurikulum MBKM di perguruan tinggi masih menimbulkan Pro dan Kontra di dalam Perguruan Tinggi sendiri. Banyak praktisi pendidikan yang Pro namun tidak sedikit pula yang kontra. Kebebasan birokrasi yang diberikan kepada mahasiswa dalam mempersiapkan karir kedepannya dalam MBKM memang memberikan kebebasan bagi mahasiswa dalam menentukan arah belajar mahasiswa. Sebagai contoh pada program studi independen mahasiswa di bebaskan untuk kuliah dan memilih mata kuliah di jurusan yang berbeda maupun di perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan minat mahasiswa. Di satu sisi, program ini bagus karena memberikan kesempatan besar kepada mahasiswa dalam mengeksplor banyak hal di luar kampus atau perguruan tingginya, serta mahasiswa dapat membangun link yang luas melalui program ini (Susetyo, 2020). Namun ada beberapa hal juga yang di khawatirkan dari program ini, seperti mahasiswa memilih mata kuliah yang tidak berhubungan dengan core kurikulum prodi asalnya. Hal ini di khawatirkan akan membuyarkan visi lulusan sebuah prodi.

Beberapa keluhan datang dari dosen-dosen pada perguruan tinggi yang mengeluhkan efek pelaksanaan kurikulum MBKM, seperti, dengan dilaksanakannya program MBKM pada Perguruan Tinggi, mahasiswa dapat mengkonversi kegiatan dari program MBKM

yang mereka jalani menjadi 20 SKS pada satu semester, sehingga tidak jarang Prodi melakukan restrukturisasi kurikulum yang ada menyesuaikan dengan Kurikulum MBKM. Sebagai contoh, biasanya mata kuliah tertentu akan selalu keluar dan distribusikan untuk mahasiswa pada semester lima. Namun karena adanya perubahan dan penyesuaian dengan pelaksanaan Kurikulum MBKM, mata kuliah tersebut muncul pada semester yang berbeda. Hal ini terkadang akan mengganggu kestabilan dan linierita ilmu dari susunan mata kuliah yang telah di setting sebelumnya.

Permasalahan lainnya yang menjadi sorotan dari pelaksanaan program kurikulum MBKM adalah Program kampus mengajar. Hal ini menjadi sorotan dosen khususnya dengan *background* Kependidikan. Pada program studi Kependidikan, biasanya mahasiswa akan melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yaitu pada semester tujuh, karena sebelum semester tujuh mahasiswa harus mengambil beberapa mata kuliah Kependidikan seperti mata kuliah perencanaan pembelajaran, Profesi pendidikan, evaluasi pembelajaran dan micro teaching, hal ini bertujuan agar mahasiswa siap dalam melaksanakan praktek mengajar saat di sekolah. Hal ini sangat berbeda dengan program Kurikulum MBKM, mahasiswa semester empat diperbolehkan mengikuti program kampus mengajar, sementara pada semester empat, mahasiswa belum memiliki bekal dan pengalaman yang cukup di bidang kependidikan melihat beberapa mata kuliah kependidikan belum didapatkan oleh mahasiswa semester empat pada Prodi Kependidikan.

2. Metode

Pendekatan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode *library research*. Dalam satu kepastakaan, data diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait berupa artikel, buku, dokumen, maupun pencermatan terhadap literatur online. Selanjutnya data dianalisis dan diuraikan bahasan yang sesuai tema yang dibahas.

Sumber utama dalam studi ini adalah kebijakan kurikulum “Merdeka Belajar” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 24/06/2020. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan identifikasi wacana dari utama artikel jurnal nasional maupun internasional, Undangundang negara, maupun web (internet). Paling tidak tahapan yang dilakukan penulis adalah

1. Melacak dan mengumpulkan data-data terkait tema kajian melalui buku-buku, dokumen, majalah internet (web).
2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah utama yang dikaji.

3. Hasil Dan Pembahasan

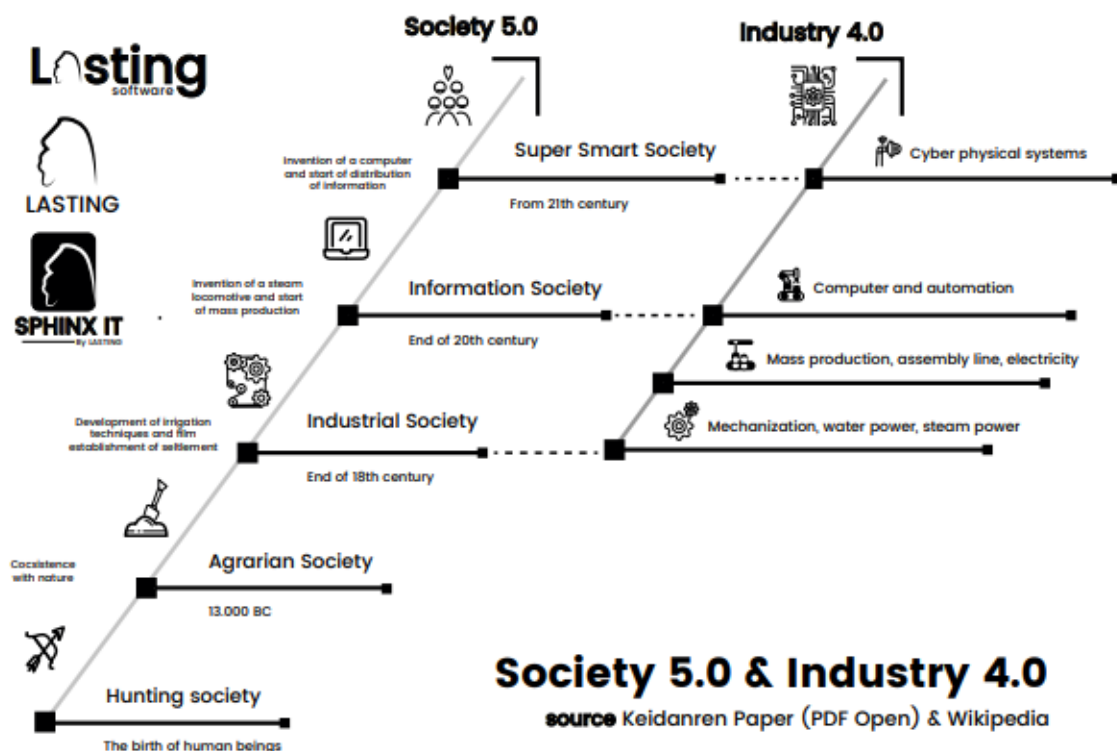
Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18. Kebijakan ini diberlakukan secara khusus bagi program studi Sarjana dan program studi Sarjana Terapan.

Dengan demikian esensi dari MBKM adalah pembelajaran berpusat pada

mahasiswa. Selama ini mahasiswa hanya mengikuti mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Program Studi (PPS) Sarjana Terapan yang distrukturkan dalam berbagai mata kuliah dengan beban belajar minimal 144 sks. Karena mekanisme penetapan bahan kajian, beban belajar, mata kuliah bersifat mandatori dari PPS, maka seringkali minat dan bakat mahasiswa terabaikan dan dikemas secara general dalam organisasi mata kuliah yang ditetapkan oleh PPS.

Kebijakan MBKM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting khususnya di program Sarjana Terapan yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja, sementara dunia kerja itu sendiri berubah dengan sangat pesat karena adanya disrupsi teknologi sebagai konsekuensi logis dari adanya Industri 4.0 (sistem siber-fisik).

Lulusan PS Sarjana Terapan harus mampu secara cerdas menggunakan teknologi internet of things¹) yang menjadi landasan Industri 4.0 agar bisa menjadi bagian dari masyarakat informasi (4.0 society) dan masyarakat super cerdas (5.0 society).



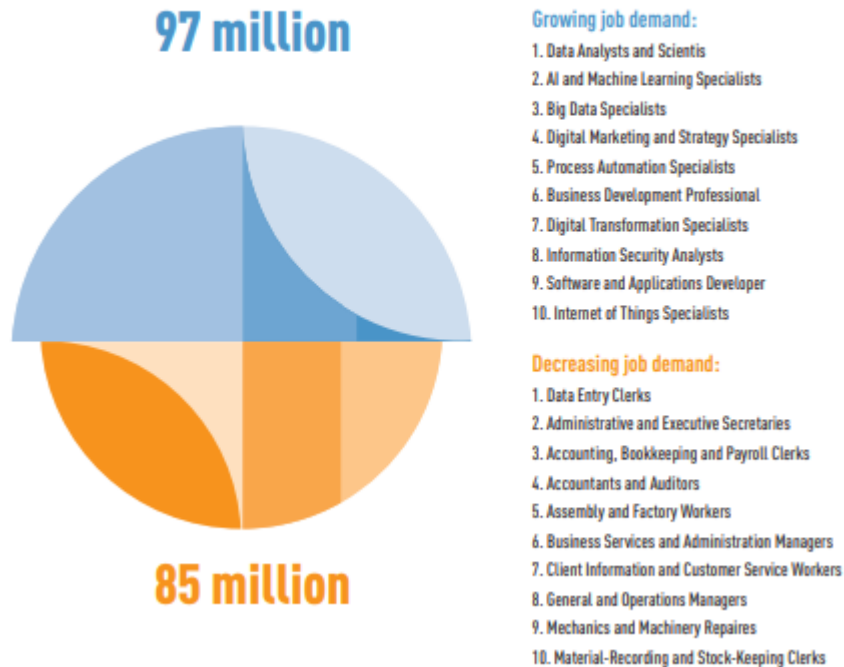
Gambar 2. Perkembangan Masyarakat yang dituntut akibat adanya perkembangan industry (Dikti, 2020b)

Penerapan teknologi internet of things dalam industri 4.0 akan menuntut jenis pekerjaan baru, sebagaimana dinyatakan dalam laporan World Economic Forum tahun 2020 (Gambar 2). Tuntutan bagi kompetensi lulusan menjadi sangat tinggi, namun PPS Sarjana Terapan belum dapat bergerak sama cepat dalam menyiapkan proses pembelajaran yang dibutuhkan bagi lulusannya memasuki masyarakat informasi yang cerdas dalam menggunakan sistem siber-fisik (4.0 and 5.0 Societies). Kondisi ini menyebabkan MBKM sangat dibutuhkan untuk memberi ruang gerak yang lebih cepat dan lebih lincah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya agar mampu berperan aktif ketika memasuki masyarakat 4.0 dan 5.0.

Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif agar mahasiswa dapat meraih capaian

pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) secara optimal, relevan untuk masa sekarang dan masa depan yang dekat (near future) dengan karakteristik industri 4.0.

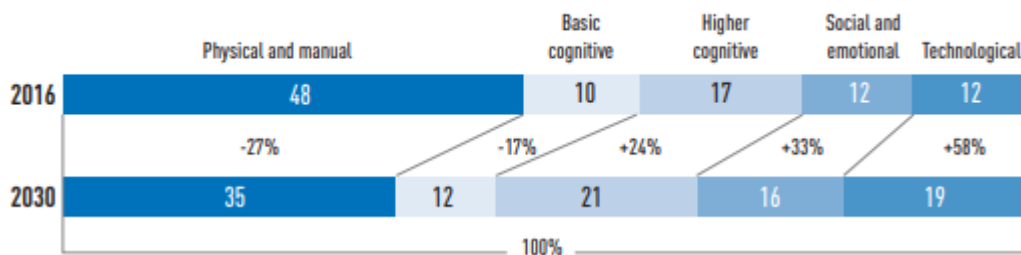
By 2025, new jobs will emerge and other will be displaced by a shift in the division of labour between humans and machines, affecting:



Gambar 3. Lanskap Pekerjaan pada tahun 2025 (Dikti, 2020b)

Pemerintah memahami bahwa lulusan perguruan tinggi yang akan berhadapan langsung dengan dunia kerja pada era industri 4.0. yang menuntut kompetensi kerja yang sangat berbeda, sebagaimana dinyatakan oleh penelitian Kweilin Ellingrud, Rahul Gupta, and Julian Salguero, sebagai berikut:

Skill shift in US and Western Europe by category, % of time spent



Gambar 4. Perubahan signifikan terhadap kebutuhan keterampilan kerja khusus (hard skills) dan keterampilan lunak (soft skills) dalam era Industri 4.0 (Dikti, 2020b)

Kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat melalui media sosial, kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan nilai guna teknologi maju, kemampuan pemanfaatan teknologi otomasi dan kecerdasan buatan, ketahanan terhadap tekanan budaya kerja, kemampuan beradaptasi dengan situasi secara cepat dan tepat, sangat dibutuhkan oleh lulusan PS Sarjana Terapan di era ini.

Sementara kesiapan PPS Sarjana Terapan dalam menyiapkan lulusan dengan

kualifikasi tersebut di atas masih belum merata di semua perguruan tinggi vokasi. Untuk proses pembelajaran yang sifatnya konvensional dengan beban untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan saat ini, masih banyak PPS yang belum dapat menyelenggarakan program dengan peringkat akreditasi Baik Sekali atau Unggul. Oleh karena itu, Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bertujuan untuk:

1. mengurangi kesenjangan antara kapasitas penyelenggaraan PT dengan tuntutan kualifikasi lulusan dengan menggunakan peran pemangku kepentingan di luar kampus yang lebih mumpuni melakukan itu.
2. memberikan kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia kerja pada era industri 4.0. memanfaatkan platform belajar pihak ketiga

Implementasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka berfokus pada pengembangan keterampilan mahasiswa sebagai calon lulusan sarjana yang diharapkan mampu menjawab segala tantangan di era disrupsi 4.0 dan 5.0 di masa mendatang. Suatu program pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan dalam setiap proses pengimplementasiannya. Pada pembahasan ini penulis menjabarkan apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan dari program merdeka belajar kampus merdeka

Keunggulan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka:

1. Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, Menteri Pendidikan Indonesia Nadhiem Makarim mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program merdeka belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak. Sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui peranya sebagai mahasiswa dengan baik Kurniawan et al., 2020).
2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan merdeka belajar, mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil. Seperti halnya melakukan penelitian dan research secara mendalam pada mata pelajaran yang diambil. Hal ini tentunya berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Selain ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas (Kholik et al., 2022; Sintiawati et al., 2022).
3. Memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kesempatan emas pada program ini bisa didapatkan melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kesempatan ini dinilai mampu mewadahi mahasiswa untuk lebih berkompeten dan terjun langsung ke lingkungan masyarakat. Tak hanya itu, mahasiswa nantinya akan memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sekitar. Sehingga mahasiswa yang terjun langsung di masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakat (Laga et al., 2022).
4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program merdeka belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Dalam hal ini mahasiswa dapat

memperluas:

- a) Memperluas networking dan pengalaman belajar di luar prodi maupun universitas
 - b) Kesempatan belajar secara langsung dengan praktisi yang berkompeten di bidangnya
 - c) Eksplorasi pengetahuan dan penerapan (implementasi) kemampuan di industri kerja atau lingkungan bermasyarakat (Laga et al., 2022).
5. Bagi dosen. Meningkatkan kemampuan pedagogi dan penguasaan substansi pembelajaran
 6. Bagi institusi PPS Sarjana Terapan.
 - a) Meningkatkan kapasitas institusi Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara PS-PTV dalam melakukan evaluasi diri pada bagian proses pembelajaran dan melakukan peningkatan kapasitas berdasarkan hasil analisis tersebut.
 - b) Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - c) Memperkecil kesenjangan kemampuan PPS dalam memberikan kemampuan kerja khusus mahasiswa yang relevan dengan tuntutan pemanfaatan teknologi mutakhir.
 - d) Meningkatkan kapasitas institusi PT penyelenggara PS-PTV dalam memberdayakan dan memberi nilai tambah dari kerja sama dengan pemangku kepentingan yang relevan.
 - e) Meningkatkan kapasitas institusi PT penyelenggara PS-PTV dalam melakukan rekognisi proses pembelajaran dari institusi eksternal.
 7. Bagi dunia kerja.
 - a) Memperoleh lulusan yang dapat diandalkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
 - b) Memperoleh lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan dalam menjalankan pekerjaan di era Industri 4.0.

Kelemahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. Dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi, bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program merdeka belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat akan berganti. Selain itu, program merdeka belajar ini juga masih seumur jagung. Usai dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, merdeka belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan research yang lebih dalam menerapkannya.
2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Diulas dalam ideapapers.com, prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam merdeka belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang. Mulai dari kepribadian, softskill, ketrampilan, hingga bela Negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program merdeka belajar belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik.
3. Persiapan SDM yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program

merdeka belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program ini.

Dari beberapa kelemahan yang di hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka maka diperlukan sebuah solusi yang mampu menghadapi tantangan tersebut yakni perlunya sosialisasi program untuk memberikan pemahaman bagi pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka serta mengkaji kembali kebutuhan dan juga karakteristik perguruan tinggi, karena setiap perguruan tinggi memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu perlu dikaji ulang agar dapat berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama

4. Kesimpulan

Program MBKM yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia memiliki keunggulan (menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel; memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil; memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat; bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja) dan juga kelemahan (dinilai belum begitu matang dalam persiapan; pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik; persiapan SDM yang belum terstruktur). Agar program MBKM ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan sebuah perencanaan, sosialisasi dan evaluasi yang matang agar program ini dapat berjalan dengan baik.

5. Referensi

- Arifin, S., & Muslim, M. O. H. (2020). Tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar, kampus merdeka” pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 3(1).
- Baharuddin, M. R. (2021a). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Baharuddin, M. R. (2021b). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Dikti, D. (2020a). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Dikti, D. (2020b). *Buku Saku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
- Dimmera, B. G., Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2022). Persepsi, Kebutuhan Dan Tantangan Implementasi Kebijakan “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Perbatasan. *Sebatik*, 26(2), 768–773.
- Junaidi, A. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka-Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- (MBKM) Berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738–748.
- Kurniawan, N. A., Saputra, R., Daulay, A. A., & Zubaidah, Z. (2020). Implementasi Prinsip-prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon Konselor. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Malang*, 69–72.
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2022). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 699–706.
- Nofia, N. N. (2020). Analisis tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar kampus merdeka” pada perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2).
- Putra, B. A., Salsabila, A. I., Nabila, K. R., & Zakiah, R. (2022). Peluang Dan Tantangan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. *Edu Cendikia*, 2, 6–13.
- Sherly, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. (2021). Merdeka belajar: kajian literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*, 183–190.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022a). Partisipasi civitas akademik dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915.
- Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022b). Partisipasi civitas akademik dalam implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 902–915.
- Sopiansyah, D., & Masruroh, S. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.
- Susetyo, S. (2020). Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 29–43.